

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dedolarisasi adalah suatu upaya untuk mengurangi atau meniadakan penggunaan dolar AS dalam perdagangan internasional suatu negara. Tiongkok bersama negara-negara yang tergabung dalam organisasi BRICS merupakan salah satu contoh dari negara yang menerapkan kebijakan dedolarisasi secara bertahap.

Dolar AS merupakan aktor penting dalam perdagangan internasional dan keuangan global. Sistem keuangan global berbasis dolar AS sudah berkembang pasca perang dunia II berakhir melalui Bretton Woods Agreement pada tahun 1944 yang membuat dolar AS sebagai mata uang global.

Mata uang global memiliki beberapa fungsi penting, termasuk sebagai alat pertukaran internasional yang memudahkan perdagangan antar negara, sebagai standar nilai untuk harga barang dan jasa di pasar global, dan sebagai alat pengukur nilai ekonomi yang memungkinkan perbandingan antara negara dalam hal inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Mata uang global juga dapat berperan sebagai cadangan devisa untuk bank sentral dan negara, memberikan stabilitas dan keamanan dalam perdagangan dan keuangan internasional.

Pada tahun 2009, Tiongkok secara resmi mengumumkan rencana untuk melakukan dedolarisasi. Tiongkok menyatakan keinginan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sebagai mata uang cadangan dan juga ingin

melakukan internasionalisasi terhadap mata uang yuan (renminbi) agar dapat bersaing dalam sistem keuangan global.

Kebangkitan ekonomi Tiongkok telah menyebabkan pengurangan dominasi ekonomi Barat di tingkat global. Tiongkok telah menjadi pusat manufaktur dunia dan menjadi pasar konsumen yang besar. Negara ini telah menjadi destinasi utama bagi perusahaan multinasional untuk berinvestasi dan memproduksi barang dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini telah menggeser peta perdagangan dan investasi global dan menempatkan Tiongkok sebagai pesaing utama bagi kekuatan ekonomi Barat.

Tiongkok juga merupakan aktor penting dalam organisasi BRICS yang dimana organisasi tersebut berkeinginan untuk mengurangi penggunaan dolar dalam perdagangan internasional antar mitra. Bersama-sama, seluruh keanggotaan BRICS ingin menentang dominasi dolar AS agar dapat memandirikan keuangan global negara-negara anggota. Organisasi ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan bersama dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan internasional.

Dedolarisasi didorong oleh beberapa faktor seperti ketegangan geopolitik dengan Amerika Serikat dan juga agar terhindar dari resiko fluktuasi dolar AS maupun sanksi-sanksi yang diberikan oleh AS saat hubungan diplomatik mengalami ketegangan. Tiongkok yang merupakan salah satu rival dari Amerika Serikat telah mengupayakan beberapa kebijakan seperti melakukan kebijakan currency swap, local currency transaction, dan cross-border interbank payment system.

Kebijakan currency swap atau pertukaran mata uang, untuk memfasilitasi perdagangan dalam yuan, Tiongkok juga menggunakan jalur swap untuk menyediakan likuiditas kepada negara-negara mitra dalam perdagangan.

Kemudian dengan kebijakan LCT, untuk meningkatkan perdagangan bilateral, mengurangi risiko fluktuasi mata uang asing, dan memperkuat kedaulatan moneter masing-masing negara. Dengan kebijakan tersebut, Tiongkok dapat meningkatkan kekuatan yuan dalam transaksi internasional.

Sedangkan CIPS yang menawarkan layanan kliring dan penyelesaian bagi para pesertanya dalam pembayaran dan perdagangan yuan lintas batas. CIPS bertujuan untuk memenuhi permintaan penggunaan yuan lintas batas, mengintegrasikan lebih lanjut saluran dan sumber daya pembayaran dan penyelesaian lintas batas yuan. Kehadiran Tiongkok sebagai salah satu negara eksportir terbesar juga membantu dedolarisasi dilaksanakan dan pada saat yang sama juga membuat internasionalisasi yuan berlanjut secara bertahap.

Dengan menggunakan perspektif dari Merkantilisme yang menekankan intervensi negara dalam ekonomi, penulis dapat menyimpulkan bahwa dedolarisasi yang dilakukan oleh Tiongkok didorong oleh besarnya intervensi negara dengan memberikan subsidi dalam produksi dan juga kontrol yang ketat terhadap mata uang yuan. Hal ini demi kepentingan Tiongkok untuk memperkuat posisi yuan sebagai mata uang global.

Melalui BRICS, Tiongkok bersama negara-negara anggota juga mendorong penggunaan mata uang lokal dan memperluas kerjasama ekonomi, serta mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS. Upaya ini menunjukkan bahwa

bersama BRICS, Tiongkok ingin membangun sistem keuangan global yang lebih beragam dan tidak bergantung pada dolar AS.

Beberapa manfaat bagi Tiongkok melalui kebijakan dedolarisasi seperti berkurangnya ketergantungan terhadap dolar AS dan meningkatnya efisiensi perdagangan internasional dan juga menguatnya stabilitas ekonomi dari Tiongkok. Pengaruh Tiongkok juga meningkat dalam tata kelola ekonomi global namun, masih memiliki keterbatasan sekaligus tantangan dikarenakan dolar AS masih menjadi mata uang global utama dan masih mendominasi hingga saat ini.

Kebijakan dedolarisasi Tiongkok juga sejalan dengan prinsip-prinsip dari merkantilisme yang menekankan pentingnya peran negara dalam ekonomi dan perdagangan internasional serta pengaruh kekuatan ekonomi negara sebagai faktor pendukung untuk peningkatan pengaruh politik dan ekonomi secara global.

Secara bersamaan, dedolarisasi yang dilakukan oleh Tiongkok juga dapat dikatakan sebagai yuanisasi. Tiongkok ingin meningkatkan nilai yuan dalam sistem keuangan global melalui beberapa kerjasama dengan negara-negara mitra maupun non-mitra untuk melakukan pembayaran berbasis yuan terhadap setiap transaksi dengan Tiongkok.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa dedolarisasi Tiongkok bersama BRICS sesuai dengan prinsip-prinsip merkantilisme melalui peran aktif dan intervensi negara untuk memperkuat posisi ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS serta untuk menciptakan sistem keuangan yang multipolar.

5.2 Saran

Saat menganalisis isu dedolarisasi Tiongkok, Penulis menyadari bahwa trend dedolarisasi ini juga sudah diterapkan oleh beberapa negara lainnya baik yang tergabung dalam keanggotaan BRICS ataupun negara-negara yang tidak tergabung dalam organisasi kerjasama ekonomi tersebut. Beberapa negara yang dapat dikatakan sebagai mitra dagang AS juga mulai menerapkan kebijakan dedolarisasi untuk kemandirian ekonomi. Untuk itu, penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk membahas trend dedolarisasi ini dengan negara-negara lain sebagai aktor dari dedolarisasi ini.

